



HANDBOOK BIROKRASI DAN GOVERNANSI PUBLIK

Project Based Learning, Kajian Lapangan, dan Pengajaran Ilmu Administrasi

Wening Mustikaningsih, S.IP., M.A.

HANDBOOK BIROKRASI DAN GOVERNANSI PUBLIK

Project Based Learning, Kajian Lapangan, dan Pengajaran Ilmu Administrasi

Wening Mustikaningsih, S.IP., M.A.



HANDBOOK BIROKRASI DAN GOVERNANSI PUBLIK
Project Based Learning, Kajian Lapangan, dan Pengajaran Ilmu Administrasi

Penulis:

Wening Mustikaningsih, S.IP., M.A.

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Andi Setiawan

ISBN:

978-623-459-768-4

Cetakan Pertama:

Oktober, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan nikmat sehat serta hidayah-Nya sehingga buku hasil Kajian dari Proses Pembelajaran BIROKRASI DAN GOVERNANSI PUBLIK telah tersusun dan telah diterbitkan. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
2. Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
4. Seluruh kalangan akademisi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Penulis menyadari bahwa buku pembelajaran ini masih perlu dilengkapi dengan kajian-kajian Birokrasi yang semakin akan lebih baru, sehingga tidak menutup kemungkinan buku pembelajaran ini akan berlanjut dalam penulisannya sesuai dengan kebaruan kebijakan, Tahun, dan Proses pembelajaran yang terus berlangsung. Semoga sedikit banyak akan memberikan kontribusi ilmu dan wawasan yang baru bagi kalangan pembaca dan terutama kalangan akademisi.

Palangka Raya, Oktober 2023

Wening Mustikaningsih, S.IP., MA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
TINJAUAN MATA KULIAH	viii
A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah	viii
B. Relevansi Mata Kuliah	viii
C. <i>Project Based Learning</i>	viii
BAB 1 KINERJA BIROKRASI DAN PERILAKU BIROKRASI	1
A. Pengantar	1
B. Kinerja Birokrasi	2
C. Perilaku Birokrasi	5
D. Referensi	11
BAB 2 DINAMIKA REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA	13
A. Birokrasi Era Reformasi di Indonesia	13
B. Dinamika Reformasi Birokrasi	17
C. Referensi	22
BAB 3 KEMITRAAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK	23
A. Pengantar	23
B. Pergeseran Paradigma Pelayanan Publik	24
C. Kemitraan Sebagai Perwujudan <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik	26
1. Konsep dan Contoh Kemitraan	26
2. Kemitraan sebagai Perwujudan <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik	30
D. Referensi	32
BAB 4 PARADIGMA GOVERNANCE; ANALISIS PERAN PEMANGKU KEBIJAKAN	35
A. Pengantar	35
B. Analisis <i>Collaborative Governance; Project</i> Penelitian Permasalahan Publik dan Keterlibatan Pemerintah Daerah	38

C. Referensi.....	42
BAB 5 KONSEP <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i>;	
<i>RELASI GOVERNMENT, SEKTOR PRIVAT DAN CIVIL SOCIETY</i>	45
A. Pengantar	45
B. Pola <i>Collaborative Governance</i> ; Relasi Pemerintah, Sektor Privat dan Masyarakat Sipil	47
C. Referensi.....	51
BIODATA PENULIS	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Reformasi Birokrasi di Indonesia	14
Gambar 2 Perubahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasca Reformasi	25
Gambar 3 Pembangunan Infrastruktur Berbasis Konsep <i>Public Privat Partnership</i> Secara Berkelanjutan	30
Gambar 4 Survei Tingkat Permasalahan Besar di Indonesia	36
Gambar 5 Pemaparan Penelitian <i>Collaborative Governance</i>	38
Gambar 6 Perbedaan Pasca Pembangunan Jalan Raya Yos Sudarso	40
Gambar 7 Hubungan Kemitraan Pemerintah – Sektor Privat/Swasta – Masyarakat Sipil (Non-Pemerintah)	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Model-Model Perilaku Organisasi	7
--	---

TINJAUAN MATA KULIAH

A. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

Mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik ini, akan mengeksplorasi tentang kajian birokrasi dengan pendekatan, pelayanan publik berkaitan secara langsung dalam praktik birokrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mempelajari tentang struktur– fungsi dan tata kelola pemerintah secara Administratif.

B. RELEVANSI MATA KULIAH

Matakuliah ini menjadi fokus utama dari mahasiswa Ilmu Administrasi Negara baik secara teoritis dan praktik. Melihat bagaimana Birokrasi sejauh ini berperan dalam negara, bagaimana isu-isu terkait dengan Birokrasi, mengkaji bagaimana para ahli memberikan makna terkait dengan Birokrasi (berkaitan dengan teori besar Birokrasi dan pelayanan Publik) dan kemudian lebih detail kelas ini akan melihat Konsep Birokrasi di wilayah terdekat (Pemerintah Lokal Daerah) dengan mahasiswa melalui Proyek Mini Riset di akhir sesi perkuliahan.

C. *PROJECT BASED LEARNING*

Metode pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain (1) Diskusi, dengan tujuan untuk membentuk mental dan pikiran serta tukar menukar pendapat. Selain itu, diskusi akan lebih komunikatif, mampu menjelaskan hal-hal yang masih semu, dan mampu mengungkap tingkat keaktifan setiap mahasiswa (2) Materi, Artikel/paper, Video Dokumenter terkait dengan Birokrasi dan Governansi Publik (3) Project Mini riset; dengan tujuan mendekatkan mahasiswa dengan Instansi Birokrasi secara praktik dan teori.



KINERJA DAN PERILAKU BIROKRASI

A. PENGANTAR

Pembangunan Nasional di Indonesia berkembang mengalami pergeseran dari sistem otoriter ke sistem demokrasi, pergeseran terjadi dimulai pada pasca reformasi birokrasi dan kemudian disertai dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang secara dinamis disertai dengan peningkatan taraf hidup, tingkat pendidikan, ditambah dengan berkembangnya kemajuan pada bidang informasi dan teknologi, menjadi meningkatnya tingkat kesadaran demokrasi dan proses *empowering* dalam lingkungan masyarakat. Fenomena ini berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemerintah yang semakin menarik perhatian masyarakat, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Dalam konteks ini, penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintah menjadi suatu tuntutan, masyarakat mulai banyak menyuarakan kritik ataupun aspirasi dalam memonitoring dan mengevaluasi proses penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi pemerintahan. Dari sisi kinerja pegawai birokrasi, dalam pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sulit dilakukan secara obyektif, disebabkan oleh karena belum diterapkan sistem pengukuran kinerja yang secara ideal diterapkan, dengan tujuan menginformasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan program-program dalam suatu instansi pemerintah secara obyektif dan terukur.

4. Fasilitas Kerja

Faktor pengaruh yang terakhir dalam perilaku birokrasi adalah fasilitas kerja. Fasilitas kerja yang dimaksud salah satunya adalah asuransi Kesehatan dan jaminan hari tua/tunjangan kesejahteraan, hal ini membentuk cara pandang pegawai bahwa organisasi/birokrasi terlindungi dari sisi aspek Kesehatan dan Kesejahteraan, sehingga terbentuknya motivasi dan loyalitas kinerja pegawai.

D. REFERENSI

- Agus Dwiyanto, dkk, 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM; Yogyakarta
- Davis, Keith dan John W. Newstrom. 1985. *Perilaku dalam Organisasi*. Penerbit Erlangga Duncan, W. Jack. 1980. *Organizational Behavior, 2 nd*. Boston: Houston Mifflin Company. Gibson, dkk. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses (Jilid I dan II)*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media; Yogyakarta.
- Harris, Marvin. 1980. *Culture Materialism: The Struggle for a Science of Culture*. New York: Vintage Books-Random House Publications.
- Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Kausar, A.S. 2006. *Budaya Patron-Klien Dalam Perilaku Birokrasi di Daerah. Stusi di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung.
- Lubis, H. S.B., dan Martani Huseini. tanpa tahun. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*.
- Mintzberg, Henry. *Organization Design*. Harvard Business Review, January-February.
- Sedarmayanti, 2012. *Reformasi administrasi Publik Birokrasi dan kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik)*. Refika Aditama; Bandung.
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Refika Aditama; Bandung
- Uno, Hamzah B dan Lina Iamtenggo, 2014, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Bumi Aksara; Jakarta



DINAMIKA REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

A. BIROKRASI ERA REFORMASI DI INDONESIA

Kajian terdahulu Riswanda (1998) memberikan makna tentang reformasi secara etimologi dan semantik, yang bermakna “*reformation is about make or become better by removing or putting right what is bad or wrong*”. Jika ditelaah secara harfiah reformasi memiliki makna, suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang kembali, hal-hal yang menyimpang dan tidak ideal atau tidak sesuai, dikembalikan pada format semula dengan menambahkan nilai- nilai ideal sesuai dengan tujuan dan kebutuhan warga Negara. Gerakan reformasi politik tahun 1998, yang kemudian diikuti lahirnya Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Otonomi dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan sistem administrasi negara dari model sentralistik ke model desentralistik. Kedua undang-undang tersebut telah membawa pada perubahan peranan yang harus dimainkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebelum berlakunya undang – undang tentang otonomi daerah peranan pemerintah pusat sangat besar dalam segala sektor pembangunan. Pemerintah pusat memegang kendali atas penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan di daerah. Namun, dengan berlakunya otonomi daerah, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, karena saat ini pemerintah pusat hanya memegang

C. REFERENSI

- Dwiyanto Agus, 2010. *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, Gava Media, Yogyakarta
- Lijan Poltak Sinambela, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2009, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Prasojo Eko, 2009, *Reformasi Kedua, Melanjutkan Estafet Reformasi*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Purwanto Erwan Agus, Wahyudi Kumorotomo, 2005, *Birokrasi Publik Dalam Sistem Politik Semi Parleментар*, Gava Media, Yogyakarta.
- Rosalina Ginting & Titik Haryati, 2011. Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah CIVIC*, Volume 1 no 2, Juli 2011.
- [www://politikana.com/baca/2010/05/22](http://politikana.com/baca/2010/05/22)



KEMITRAAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

A. PENGANTAR

Optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan, dihadapkan pada tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, berprosedur yang jelas, dan jangka waktu pelayanan yang efisien. Tuntutan pelayanan publik menjadi berkembang dan terus berupaya melakukan inovasi seiring dengan keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi, serta kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara secara demokratik, memiliki hak untuk mendapat pelayanan pemerintah yang berkualitas. Perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang era reformasi ternyata belum sepenuhnya mengubah tatanan kehidupan masyarakat pada bidang pelayanan publik (Larasati, 2008). Optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan dari waktu ke waktu masih dihadapkan permasalahan dan tantangan-tantangan tertentu, dan tidak mudah untuk mencapai kategori pelayanan yang optimal, atau yang ideal. Sehingga, keterlibatan swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil sangat diharapkan untuk melengkapi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendekati optimal dan ideal.

Keterlibatan swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil dalam optimalisasi pelayanan publik dinilai akan mendukung dalam pencapaian tujuan besar yaitu *Good Governance*, dalam konsep *Good Governance*

menerapkan *good governance*, bukan hanya berupa masalah perbaikan kondisi dan komitmen birokrasi dan administrasi publik saja, tetapi juga perbaikan kondisi dan komitmen dunia usaha dan masyarakat yang memiliki berbagai macam kelompok sosial dengan kondisi dan kepentingan yang berbeda. Ketiga unsur tersebut, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus secara bersama-sama dalam mengadakan hubungan kemitraan berupaya mewujudkan terlaksananya *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik).

Penyediaan pelayanan sosial dasar yang bermutu oleh lembaga-lembaga yang kompeten, bertanggung jawab dan akuntabel, sering dipandang sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan, mutu pelayanan mencerminkan titik temu antara permintaan dan penawaran serta menjadi faktor penentu peningkatan standar dan kualitas hidup. Konsep kemitraan menjadi penting untuk didiskusikan, karena adanya kesadaran bahwa persoalan-persoalan pembangunan tidak dapat lagi dilihat hanya dari kepentingan dan tanggung jawab satu kelompok saja. Pembangunan telah menjadi kesadaran baru sebagai 'kerja patungan' dan bukan sebagai '*single fighter*' dari pemerintah saja. Pemerintah tidak mungkin lagi mengerjakan semua urusan karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia, sehingga kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain harus dilakukan agar kualitas pelayanan publik tetap dapat dipenuhi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Sebagai suatu konsep, kemitraan pemerintah-dunia usaha-masyarakat diprediksi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik (Fatmawati, 2011).

D. REFERENSI

- Eisler, R & Montuori, A. 2001. *The Partnership Organization: A System Approach*. *O.D. Practitioner*, Vol.33, No. 2. <http://www.bepress.com/article> (download 2023, 30 Agustus)
- Fatmawati, 2011. *Kemitraan dalam Pelayanan Publik; Sebuah Kajian Penjelajahan Teoritik*.

- Hodgett, S., & Johnson, D. 2001. *Troubles, Partnership and Possibilities: a Study of Marketing Belfast Work Development Initiative in Nethern Ireland*. Journal Public Administrations & Development: Oct 2001:21, 4:ABI/INFOM Research. Pg 321-332
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2010. *Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KSP) Panduan Bagi Investor dalam Investasi di Bidang Infrastruktur*. Jakarta; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Larasati, Endang. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik (Public Services Reform) dan Partisipasi Publik*. "Dialogue" JIAKP, Vol 5, No.2, Mei 2008: 254-267 Makassar; Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. I No. 2. Oktober 2011.
- Peraturan Pemerintah Indonesia, 1997. *Kemitraan Presiden Republik Indonesia No. 44 tahun 1997 Pasal 1 ayat (1)*. Jakarta; Sekretariat Negara
- Peraturan Presiden Indonesia, 2006. *Perubahan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 ke dalam Pengadaan Tanah dan Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Indonesia No.65 Tahun 2006*. Jakarta; Sekretariat Negara
- Siregar, Doli D., 2004. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama
- Suhartono. Ehrmann. 2005. *Model-model Public Private Partnership pada Sektor Pelayanan Air Bersih*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Volume 5 No. 1 Pebruari 2005: 72-81.
- Thoha, Miftah. 2005. *Birokrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Raja Gravindo Persada



PARADIGMA GOVERNANCE; ANALISIS PERAN PEMANGKU KEBIJAKAN

A. PENGANTAR

Paradigma Governance dalam kajian Birokrasi dan Governansi publik pada mata kuliah ini diawali dengan mengkaji permasalahan-permasalahan besar di Indonesia. Permasalahan Negara Indonesia yang belum berhasil diatasi menurut kajian Katadata Media Network adalah; 1) Pengangguran, 2) Harga Bahan Pokok Tinggi/Mahal, 3) Covid-19, 4) Kemiskinan, 5)

Infrastruktur dan Pembangunan, 6) Korupsi, 7) Pendidikan, 8) Perekonomian, 9) Kesejahteraan rakyat. 10) Bencana Alam (Annur, 2022). Berbagai permasalahan yang telah dinarasikan sebelumnya akan mengarah pada analisis keterlibatan aktor-aktor penting didalam penyelesaiannya, mulai dari Pemangku Kebijakan dalam lingkup Negara hingga dalam lingkup Daerah, Organisasi Masyarakat, Masyarakat Adat, Tokoh Agama dan berbagai keterlibatan aktor lainnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tertentu. Selain keterlibatan aktor pemilik wewenang, masyarakat memiliki peran yang penting untuk terlibat dalam penyelesaian masalah dari lingkup daerah hingga Negara, dan hal ini relevan dengan prinsip-prinsip *Good Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pernyataan wawancara dapat menganalisis bawah peran pemerintah Kota Palangka Raya telah berjalan dengan baik. Walaupun lumayan banyak proyek pembangunan yang masih tertunda dalam proses pekerjaannya tetapi sudah banyak membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, seperti hal tersebut terlihat dari banyaknya perubahan kemajuan yang di rasakan masyarakat dengan pembangunan jalan dan juga dapat terlihat bahwa Infrastruktur jalan yang baik sangat mempengaruhi mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini infrastruktur jalan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ekonomi, karena dapat kita lihat dari perubahan – perubahan yang terjadi pada manfaat ekonomi yang secara langsung dipengaruhi oleh perubahan infrastruktur jalan

Keterlibatan Dinas PUPR, sektor privat dan kebutuhan masyarakat menghasilkan berbagai macam perencanaan dan kebijakan, yang berkontribusi dalam pembangunan jalan di Kota Palangka Raya khususnya di jalan Yos Sudarso dengan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sehingga proyek multiyears yang sedang di proses dapat berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa hambatan yang terjadi yang membuat ada beberapa proyek yang tertunda dan akan di lanjutkan hingga selesai di 2022 mendatang. Dengan adanya Perkembangan jalan di Yos Sudarso mengalami perubahan yang sangat pesat dan infrastruktur yang sudah di sediakan pun tidak menyia-nyiakan hasil, sehingga banyak masyarakat menjadi terbantu dalam mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

C. REFERENSI

- Akib, Kamila dan Teparé, Olfi Alfionita. 2017. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*: Vol 8 (1).
- Annur, Cindy Mutia. (2022, Februari 12). *Pengangguran hingga Korupsi, Berikut Deretan Permasalahan Utama di Indonesia*. Halaman Web;
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/pengangguran-hingga-korupsi-berikut-deretan-permasalahan-utama-di-indonesia>
Diakses pada 2023, September 3 pukul 15.00 WIB

- Center, Media. 2020. "Lagi, Hujan Deras Sebabkan Banjir Dadakan di Palangka Raya". Diakses dari <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/lagi-hujan-deras-sebabkan-banjir-dadakan-dipalangka-raja/> Pada Tanggal 12 November 2021 Pada Pukul 16.15
- Fajri, Jufri dan Ghani, Norizan Abdul. 2017. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Menurut Perspektif Tokoh Masyarakat: Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen. *Jurnal Kultur*: Vol 18 (1).
- Florini, A., & Pauli, M. (2018). *Collaborative governance for the Sustainable Development Goals*. *October 2017*, 583–598. <https://doi.org/10.1002/app5.252>
- Kalteng, Antara. 2021. "PUPR Kalteng : Pengerjaan Jalan Yos Sudarso Ujung Sudah 60 Persen". Diakses dari <https://kalteng.antaranews.com/amp/berita/449276/pupr-kalteng-pengerjaanjalan-yos-sudarso-ujung-sudah-60-persen> Pada Tanggal 12 November 2021 Pada Pukul 13.45 .
- Keyim, P. (2018). *Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland?: The Case of Vuonislahti*. <https://doi.org/10.1177/0047287517701858>
- Khanifah, L. N., Sihidi, I. T., & Hadi, K. (2020). *Collaborative Governance to Increase Building Index in Economics Through Village-Owned Enterprises Sub-District Ngroto, Malang*. 436, 854–857.
- Rachma Sari, Henny. 2015. "Pembangunan Infrastruktur Terkendala Kurangnya Tenaga Insinyur". Diakses dari <https://m.merdeka.com/uang/pembangunan-infrastruktur-terkendalakurangnya-tenaga-insinyur.html> Pada Tanggal 12 November 2021 Pada Pukul 15.00 .
- Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan umum. Jakarta. Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretariat Daerah. 2019. "Peningkatan Infrastruktur Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya". Diakses dari <https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/peningkatan-infrastruktur-jalan-yos-sudarso-kotapalangka-raja>. diakses pada Tanggal 12 November 2021 Pukul 12. 30.

- Sofyan Efendi, 2015. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara.
- Sulistio, Marvin. (2023, September 1). *Kebakaran Hutan Dan Lahan Daerah Ketapang, Pontianak, Kalimantan Barat; Kendaraan yang Akan Melintas di Jalan Poros Terhenti Akibat Tebalnya Kabut Asap*. Halaman Web; <https://www.youtube.com/watch?v=z0wgRvNYnvY> Diakses pada 2023, September 3 Pukul 15.40 WIB



KONSEP *COLLABORATIVE GOVERNANCE*; RELASI *GOVERNMENT*, SEKTOR PRIVAT DAN *CIVIL SOCIETY*

A. PENGANTAR

Proses *collaborative governance* adalah kontribusi pemerintah, swasta, masyarakat sipil yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian consensus melalui interaksi formal dan informal sesuai dengan peraturan dan norma dalam interaksi yang saling menguntungkan. Proses kolaborasi meliputi beberapa komponen yaitu 1) dinamika kolaborasi; 2) Tindakan-tindakan kolaborasi; dan 3) dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi (Puspitaningtyas, 2020). Dinamika kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2008), Thomson dan Perry (2006), Emerson (2013) melihat bahwa dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang bagus. Komponen interaksi kolaborasi itu antara lain penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Tindakan-tindakan kolaborasi dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai sulit tercapainya tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri (Agranoff & Mc Guire, 2003). Dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi merupakan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tersebut diharapkan dapat menghasilkan umpan balik,

C. REFERENSI

- Agranoff, Robert., and Michael Mc Guire. 2004. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Government*. Washington: Georgetown University Press
- Amos, H.F. Abraham. 2005. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari Orla, Orba Sampai Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Asshiddiqie, Jimly. Prof. Dr. S.H. 2004. *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press 3.
- Borrini-Feyerabend, G. 1996. *Collaboration Management of Protected Area: Tailoring the Approach to the Context*. Social Policy Group IUCN. <http://www.iucn.org/> diakses pada Tanggal 12 November 2021 Pukul 12. 30.
- Denhardt, RB & Denhardt, JV, 2000. "The New Public Service", *Public Administration Review (PAR)*, Vol. 60 No. 6, 2000.
- Eisler, R & Montuori, A. 2001. *The Partnership Organization: A System Approach*. *O.D. Practitioner*, Vol. 33, No. 2. <http://www.bepress.com/article> diakses pada Tanggal 12 November 2021 Pukul 12. 30.
- Oyugi, W.O, 2000. *Good Governance and Local Government*, Tokyo University Press.

BIODATA PENULIS

Wening Mustikaningsih, S.IP., M.A.



Penulis adalah Dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Penulis meraih gelar *Master of Art* (M.A) dari Universitas Gadjah Mada 2020. Minat kajian penulis adalah Politik Kesejahteraan, Politik Perburuhan, Politik Identitas dan Birokrasi Pemerintahan atau Governansi Publik. Email penulis: wening.mustika@umpr.ac.id.

HANDBOOK BIROKRASI DAN GOVERNANSI PUBLIK

Project Based Learning, Kajian Lapangan,
dan Pengajaran Ilmu Administrasi

Ilmu Administrasi Negara memfokuskan pada salah satu kajian utama tentang bagaimana cara Birokrasi Pemerintahan merespon tantangan perkembangan zaman dan Revolusi Industri 4.0. Buku ini adalah kajian secara teoritis dan hasil dari penelitian lapangan kolaborasi Dosen - Mahasiswa (Implementasi MBKM; *Project Based Learning*) untuk menganalisa isu kontemporer dan pergeseran paradigma governansi publik pasca reformasi hingga saat ini. Refleksi kajian ini sekaligus mengidentifikasi permasalahan publik yang muncul akibat perkembangan dan pergeseran paradigma birokrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya di lingkup Kota Palangka Raya.

Kalangan akademisi, yang ingin memahami gambaran umum tentang Birokrasi dan Governansi Publik hingga isu kontemporer, bisa menemukan dalam narasi buku ini. Para pembaca dapat menemukan tentang 1) Kajian teoritik pemahaman tentang birokrasi secara struktur, wewenang, dan perilaku birokrasi. 2) Fenomena atau bentuk permasalahan publik yang dikaji secara mendalam, 3) Pergeseran paradigma birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.